

**REKONSTRUKSI PEMBELAJARAN EKONOMI ISLAM
PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM
(Antisipasi Pengembangan ke Depan)**

Syaparuddin

Prodi Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone.

Abstract: This article discusses the need to reconstruct Islamic economy curriculum in Islamic higher education. Since about ten years ago, Islamic economy has become a special concentration in many campuses but the process of searching its most proper study model is still ongoing. To fulfill the market's demands, both state and private campuses need to reconstruct their study model of Islamic economy by stressing the combination of Sharia and economics. This will become a basis for the students to produce some creative ways to develop Islamic economy according to society's needs. The exponents of Islamic economy and the staff of departments of Islamic economy in higher education must formulate an instruction pattern or a standard curriculum for Islamic economy. Most importantly, the curriculum must be relevant to today's market. By doing so, the alumni of the departments of Islamic economy will gain an entrepreneurship ethos, to be the masters on their own.

Abstrak: Artikel ini mendiskusikan perlunya rekonstruksi kurikulum ekonomi Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Ekonomi Islam telah menjadi jurusan tersendiri di banyak kampus sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu, namun pencarian model pembelajarannya yang paling tepat masih terus dilakukan. Untuk memenuhi permintaan pasar, baik kampus negeri ataupun swasta perlu merekonstruksi model pembelajaran ekonomi Islam mereka dengan menekankan pada kombinasi ilmu Syariah dan ilmu ekonomi. Ini akan menjadi dasar bagi para mahasiswa dalam menciptakan cara-cara kreatif untuk mengembangkan ekonomi Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Para penyokong ekonomi Islam dan pengajar di jurusan ekonomi Islam di perguruan tinggi harus menyusun pola instruksi atau kurikulum standar bagi jurusan ini. Yang terpenting untuk diperhatikan adalah kesesuaian antara kurikulum tersebut dengan kondisi pasar terkini. Dengan begitu, para lulusan jurusan ekonomi Islam akan mendapat semangat kewirausahaan dan menjadi bos karena memiliki usaha sendiri.

Kata Kunci: Islam, ilmu ekonomi, model pembelajaran, kurikulum, PTAI.

Pendahuluan

Meskipun pembelajaran ekonomi Islam di perguruan tinggi agama Islam (PTAI) telah berlangsung lebih kurang satu dasawarsa, namun sampai saat ini pembelajarannya belum memiliki pola yang sama. Berbeda halnya dengan pembelajaran ekonomi umum (konvensional) di perguruan tinggi umum (PTU) yang telah mapan dan relatif memiliki bentuk yang baku. Implikasinya adalah pembelajaran ekonomi Islam di PTAI memiliki variasi dan pola yang beragam.¹

Secara spesifik, jika dilakukan penelitian di STAIN/IAIN/UIN seluruh Indonesia, maka akan ditemukan pola pembelajaran yang sangat beragam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Asumsinya adalah bahwa pembelajaran ekonomi Islam merupakan hal yang baru di PTAI tersebut.² Terasa aneh pada saat diklaim bahwa ajaran Islam itu tidak saja universal tetapi juga *syumul* (melingkupi). Akan tetapi mengapa absen dalam menginspirasi lahirnya ilmu ekonomi yang langsung bersentuhan dengan

¹ Edy Rachmat, "Meninjau Kembali Pengajaran Ekonomi Islam di PTAI", *Artikel*, Dikutip dari

www.waspadamedan.com, diakses pada tanggal 23 Desember 2010.

² *Ibid.*

kehidupan manusia, padahal jika al-Qur'an berbicara tentang semesta dapat menginspirasi banyak ilmuwan sehingga melahirkan ilmu astronomi, geologi, falak, dan ilmu-ilmu alam lainnya.³ Setiap muslim tidak akan menolak doktrin yang menyatakan bahwa al-Qur'an berbicara tentang ekonomi. Hanya saja yang belum dilakukan adalah proses konstruksi ilmu ekonomi yang berbasis al-Qur'an.⁴

Sampai saat ini, setidaknya studi ekonomi Islam masih berkiblat pada tiga mazhab besar, yaitu: mazhab Baqir As-sadr, mazhab *Main Stream* dan mazhab Alternatif Kritis. Menurut Adiwarmanto Karim, mazhab Baqir As-Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi dan Islam tidak akan pernah bisa sejalan. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Untuk menguatkan argumentasinya, Adiwarmanto mengatakan jika ilmu ekonomi muncul karena keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia terbatas. al-Qur'an menurut Sadr menolak pernyataan ini. Islam tidak mengenal sumber daya terbatas sebagaimana yang dinyatakan al-Qur'an. Masalah ekonomi menurut Sadr muncul karena keserakahan manusia. Lebih ekstrim dari itu, Sadr juga menolak istilah ekonomi Islami. Istilah yang tepat adalah *al-Iqtisad* yang makna asalnya adalah keseimbangan (*equilibrium*).⁵

Mazhab *main stream* berbeda dengan Baqir Sadr. Bahkan mazhab ini memiliki kesamaan pandangan dengan mazhab ekonomi konvensional. Bedanya hanyalah pada cara menyelesaikannya. Di dalam ekonomi konvensional misalnya, penyelesaian dilakukan lewat keputusan pribadi atau pertimbangan sosiologi, tetapi di dalam Islam keputusan harus diambil dengan mempertimbangkan bahkan berdasarkan pesan-pesan wahyu. Bagi aliran ini, yang terpenting adalah bagaimana menerapkan nilai dan etika Ilahiyah dalam konstruksi bangun ilmu ekonomi dan prakteknya. Kedua

mazhab ini dikritik oleh Timur Kuran. Mazhab Baqir Sadr baginya terlalu berambisi untuk menemukan sesuatu yang baru, yang sebenarnya telah ditemukan orang lain. Sedangkan mazhab *main stream* hanya menjiplak ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat. Baginya, kedua aliran ini harus dikritik. al-Qur'an pasti benar, tetapi ekonomi Islam karena ia hanya tafsiran maka bisa saja salah. Karena itu, kritik terhadap ekonomi konvensional dan Islam harus terus dilakukan.⁶

Perwujudan ketiga aliran ini tampak dalam diskursus dan pembelajaran ekonomi Islam di dunia dan lebih spesifik lagi di Indonesia. Ada perguruan tinggi dan pakar yang memilih mazhab *main stream*. Mereka melakukan apa yang disebut dengan islamisasi ilmu ekonomi. Bagi mereka sumbangan Islam sesungguhnya pada aspek aksiologi semata. Mereka kerap mempertanyakan epistemologi ilmu ekonomi Islam jika ekonomi Islam itu telah menjadi ilmu. Ada pula yang melakukan kritik terhadap ekonomi konvensional dan berupaya untuk menemukan teori-teori dan model-model baru. Ada pula yang mengkritik kedua-keduanya dan berusaha untuk membangun ekonomi Islam yang murni syariah.⁷

Diskursus tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di PTAI, utamanya di PTAIN sedang dalam proses pencarian bentuk. Menegasikan yang satu dan mengafirmasi yang lain adalah sikap yang tidak bijak. Lebih baik memberi ruang yang sama kepada ketiga bentuk aliran tersebut untuk berdialog dan mencari titik temu. Lebih penting dari itu, usaha yang paling mungkin dilakukan adalah mendorong dialog dan diskusi yang berkelanjutan sampai akhirnya ditemukan bentuk pembelajaran ekonomi Islam yang relatif sama.

Di samping itu, tugas mendesak eksponen ekonomi Islam dan pengelola jurusan/prodi ekonomi Islam saat ini adalah tidak sekedar merumuskan pola pengajaran atau kurikulum studi ekonomi Islam/syariah yang baku dan terstandar, tetapi tidak kalah pentingnya adalah

³ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XX (Bandung: Mizan, 1999), h. 246.

⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid Pertama, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995), h. 69.

⁵ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. III, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 30-31.

⁶ *Ibid.*, h. 31-33.

⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. 39-41.

memastikan bahwa kurikulum yang dirumuskan harus relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Bahkan lebih jauh dari itu, alumni prodi ekonomi Islam harus memiliki etos kewirausahaan yang membuatnya mandiri.

Overview Ekonomi Islam

Definisi dan Orientasi Ilmu Ekonomi Islam

Menurut Umar Chapra, ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berupaya membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langkah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan-tujuan Syaria'h (*maqashid al-Syari'ah*).⁸ Dalam arti, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, dan tanpa mengesampingkan keluarga, solidaritas sosial dan ikatan moral di dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya meningkatkan kesejahteraan manusia, yang menjadi target dari semuanya, dapat membantu mengarahkan dirinya pada cakrawala pengetahuan yang luas, baik dalam dataran teoritis maupun praktis.⁹

Fokus ilmu ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan manusia. Karena itu, semua sektor kehidupan manusia harus berinteraksi secara signifikan dengan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Simetri antara kepentingan pribadi dan sosial inilah yang pada akhirnya dapat membantu mewujudkan kesejahteraan. Namun permasalahannya, kesejahteraan di dalam masyarakat tidak mesti ada, karenanya harus selalu diciptakan.¹⁰ Sementara dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, ada 4 tugas yang harus diemban oleh ilmu ekonomi Islam, yaitu: *pertama*, Ilmu ekonomi Islam harus mempelajari perilaku sebenarnya dari masing-masing individu, kelompok perusahaan, pasar dan pemerintah, seperti yang dipraktekkan oleh ekonomi konvensional. Selain itu, perilaku manusia harus pula dipelajari sebagaimana

adanya tanpa membatasi ruang lingkungannya pada aspek tertentu, karena hal itu jelas merupakan suatu asumsi yang tidak realistis; *kedua*, Ilmu ekonomi Islam harus mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga-lembaga Islam, dan menganalisis secara ilmiah dampaknya terhadap selera dan preferensi konsumen, dan perilaku individu. Dengan demikian, semuanya itu berorientasi pada nilai-nilai moral yang dapat mengarah kepada terbentuknya upaya pencapaian tujuan kemanusiaan; *ketiga*, Ilmu ekonomi Islam harus mampu menjelaskan bahwa pranata ekonomi yang dimilikinya jelas berbeda dengan pranata ekonomi lainnya. Oleh sebab itu, perilaku ekonomi yang mereka (umat Islam) lakukan pun seharusnya berbeda, dan di dalam menangani masalah perekonomian pun tentunya mereka punya solusi tersendiri; *keempat*, Ilmu ekonomi Islam harus bisa memberikan kontribusi positif, baik menyangkut teori maupun praktek guna menghadapi perubahan sosial-ekonomi dan politik, yaitu strategi yang dapat membantu mengarahkan semua pelaku pasar (seperti: penjual, pembeli dan orang-orang yang terkait dengan aktivitas pasar), yang dapat mempengaruhi alokasi dan distribusi sumber daya, sehingga apa yang dibutuhkan bagi pencapaian tujuan kemanusiaan dapat dipenuhi.¹¹

Keempat tugas itu tidak hanya berguna untuk menganalisis sebab-sebab utama dari permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara muslim, tetapi juga dapat mengarahkan umat Islam kepada penentuan sikap, seperti bagaimana permasalahan itu dapat diselesaikan tanpa mengesampingkan *maqashid al-syariah*.

Pengembangan Ekonomi Islam

Di panggung internasional, kemunculan ilmu ekonomi Islam modern, dimulai pada tahun 1970-an, meskipun pada masa klasik Islam, telah muncul pemikiran-pemikiran cemerlang tentang ekonomi Islam, seperti Imam al-Ghazali, Ibnu Taymiyah Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Bahkan ekonomi Islam itu sesungguhnya telah lahir sejak masa nabi Muhammad Saw.¹²

⁸ Umar Chapra, *What is Islamic Economics?* (Jeddah: IRTI/IDB, No. 9 in the IDB Prize Winners' lecture Series, 1996), hlm. 33, dan juga *Islam and the Economics Challenge* (Nigeria: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 7.

⁹ Umar Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000), h. 125.

¹⁰ *Ibid.*, h. 126.

¹¹ *Ibid.*, h. 127-128.

¹² Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi III, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. XI.

Kemunculan ekonomi Islam di masa modern, ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Umer Chapra, Abdul Mannan, Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, Baqir Shadr, dll. Sejalan dengan itu berdiri Islamic Development Bank pada tahun 1975 dan selanjutnya diikuti pendirian lembaga-lembaga perbankan dan keuangan Islam lainnya di berbagai negara. Pada tahun 1976 para pakar ekonomi Islam dunia berkumpul untuk pertama kalinya dalam sejarah pada *International Conference on Islamic Economics and Finance* di Mekkah.¹³

Di Indonesia, kemunculan lembaga-lembaga keuangan Islam modern dimulai tahun 1990an, yang ditandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi setelah terpaan krisis moneter 1997, khususnya sejak tahun tahun 2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah.¹⁴

Setelah terjadi krisis 1997, hampir seluruh bank konvensional dilikuidasi karena mengalami *negative spread*, kecuali bank yang mendapat rekap dari pemerintah melalui BLBI dalam jumlah besar mencapai Rp 650 triliun. Bank-bank konvensional itu bisa diselamatkan dengan bantuan BLBI.¹⁵

Krisis tersebut membawa hikmah bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7/1992. Pasca UU tersebut sejumlah bank konversi kepada syariah dan membuka unit usaha syariah. Perkembangan itu selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian

syariah dan sebelumnya telah berkembang lembaga keuangan mikro syariah BMT.¹⁶

Dari perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah tersebut perlu dicatat. *Pertama*, bank syaria'ah telah menunjukkan ketangguhannya dalam masa krisis moneter. Ketika bank-bank konvensional mengalami likuidasi, bank syariah dapat bertahan, karena sistemnya bagi hasil, sehingga tidak wajib membayar bunga pada jumlah tertentu kepada nasabah sebagaimana pada bank konvensional.

Kedua, pemerintah telah membantu bank-bank raksasa agar bisa bertahan dengan BLBI yang disusul dengan pembayaran bunga obligasi dan SBI dalam jumlah ratusan triliun rupiah. Secara ekonomi kenegaraan, bank-bank konvensional ribawi sesungguhnya adalah parasit bagi perekonomian negara, karena bank konvensional tersebut telah menguras dana APBN setiap tahun dalam jumlah yang sangat besar.

Ketiga, bank-bank syariah sepeserpun tidak dibantu pemerintah, sementara bank konvensional telah menguras keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. *Keempat*, FDR bank syariah senantiasa tinggi, dalam masa yang panjang bertengger di atas 100 %. Ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga bersifat produktif/diinvestasikan kepada usaha masyarakat. Sementara bank konvensional cukup lama bertengger di angka 30-40 %. Walaupun kini LDR-nya di atas 50-60 % namun secara riil, fungsi intermediasinya masih sangat rendah. Hal ini sekaligus menjadi beban negara, karena penempatan dananya di SBI meniscayakan bunga. Membayar bunga SBI tetap menjadi beban rakyat Indonesia yang mayoritas miskin.¹⁷

Kendati demikian, bukan berarti pengembangan ekonomi Islam berjalan mulus tanpa hambatan dan rintangan. Salah satu persoalan serius yang dihadapi adalah sumber daya manusia. Pengembangan ekonomi Islam di Indonesia sesungguhnya belum didukung oleh ahli dan tenaga terampil yang benar-benar menguasai ilmu ekonomi Islam.¹⁸ Untuk itulah

¹³ Munrokhim Misanam, dkk., *Ekonomi Islam*, Edisi I, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 116-117.

¹⁴ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), h. 68-69.

¹⁵ *Ibid.*, h. 70.

¹⁶ *Ibid.*, h. 71.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi (Yogyakarta: YPP AMP YKPN, 2005), h. 15-19.

¹⁸ Muhammad Firdaus, dkk., *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Cet. II (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 72.

lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai tingkatan (strata) sangat dibutuhkan untuk menyediakan SDM yang ahli secara teoritis dan praktis.

Pembelajaran Ekonomi Islam pada PTAI

Pada masa mendatang, tidak tepat jika lembaga keuangan syari'ah, bank dan non bank dikelola oleh para muallaf, "mengislamkan" orang yang semula berpikir kapitalis, dan tentunya hal ini bukanlah pekerjaan mudah. Karena itu, tugas ini menjadi salah satu tanggungjawab lembaga pendidikan tinggi agama Islam baik PTAIN maupun PTAIS yang mengajarkan studi ekonomi Islam.

Di antara PTAIS yang mengajarkan studi ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, yaitu: STIE Yogyakarta (1997), STEI SEBI (1999), STIE Tazkia (2000), dll. Semenjak Mukhtar IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam) September 2005 di Medan, pertumbuhan program studi Ekonomi Islam makin pesat. Semua Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam bentuk IAIN dan UIN telah membuka prodi Ekonomi Islam. Demikian pula sebagian besar STAIN di seluruh Indonesia.¹⁹

Secara kelembagaan, PTAI menunjukkan dua trend kelembagaan pembelajaran ekonomi Islam yang diselenggarakannya. *Pertama*, pembentukan jurusan/program studi/konsentrasi yang mengusung secara spesifik nomenklatur ekonomi Islam/Syariah. *Kedua*, pembentukan perguruan tinggi (sekolah tinggi) yang mengkhususkan diri pada studi ekonomi Islam/syariah.

Pada trend pertama, selain terdapat perbedaan nomenklatur jurusan/program studi/konsentrasi, terdapat pula variasi nomenklatur fakultas yang menaungi jurusan/program studi/konsentrasi tersebut, yaitu terdapat tiga fakultas: (1) fakultas syariah, (2) fakultas syariah dan hukum atau fakultas syariah dan ilmu hukum, dan (3) fakultas ekonomi atau fakultas ekonomi dan bisnis.²⁰

Di PTAI yang menggunakan nomenklatur fakultas syariah, pembelajaran ekonomi Islam diselenggarakan oleh jurusan/program studi/konsentrasi yang nomenklaturnya berbeda satu sama lain. Varian-varian nomenklaturnya, yaitu: muamalah, muamalah (ekonomi Islam), muamalah (hukum ekonomi Islam), ekonomi Islam, ekonomi syariah, keuangan syariah, manajemen keuangan syariah, hukum bisnis syariah, dan muamalah ekonomi dan perbankan Islam.

Di PTAI yang menggunakan nomenklatur fakultas syariah dan hukum atau nomenklatur fakultas syariah dan ilmu hukum, pembelajaran ekonomi Islam diselenggarakan oleh jurusan/program studi/konsentrasi yang nomenklaturnya juga berbeda satu sama lain. Varian-varian nomenklaturnya, yaitu: muamalah (ekonomi Islam), muamalah (hukum ekonomi Islam), dan ekonomi Islam.

Di PTAI yang menggunakan nomenklatur fakultas ekonomi atau nomenklatur fakultas ekonomi dan bisnis, pembelajaran ekonomi Islam diselenggarakan oleh jurusan/program studi/konsentrasi yang nomenklaturnya juga berbeda satu sama lain. Varian-varian nomenklaturnya, yaitu: keuangan Islam, dan perbankan syariah.

Pada trend kedua, pembentukan perguruan tinggi (sekolah tinggi) yang mengkhususkan diri pada studi ekonomi Islam/syariah, pembelajaran ekonomi Islam diselenggarakan oleh jurusan/program studi/konsentrasi yang nomenklaturnya juga berbeda satu sama lain. Model kedua ini dapat dilihat pada STIE Yogyakarta (1997), STEI SEBI (1999), STIE Tazkia (2000), dll.²¹

Jakarta, UIN Alauddin, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011, Tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Pekanbaru, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011. Tim Fakultas Ekonomi UIN Malang, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011. Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011

¹⁹ Edy Rachmat, "Meninjau Kembali Pengajaran Ekonomi Islam di PTAI", 23 Desember 2010.

²⁰ Tim Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, UIN Bandung, UIN Malang, IAIN Semarang, IAIN Palembang, IAIN Surabaya, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011. Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN

²¹ Tim STIE Yogyakarta, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011, Tim STEI SEBI, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011, Tim STIE Tazkia, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.

Dari segi total jumlah beban sks pada kurikulum ekonomi Islam, terdapat variasi di antara PTAI. Di fakultas yang nomenklatur fakultas syariah memiliki total beban sks berkisar 146-156 sks. Sedangkan di fakultas yang nomenklatur fakultas syariah dan hukum atau fakultas syariah dan ilmu hukum memiliki total beban sks berkisar 152-157 sks. Sementara di fakultas yang nomenklatur fakultas ekonomi atau fakultas ekonomi dan bisnis memiliki total beban sks berkisar 145-157 sks.

Dari sisi *core* keilmuan, di fakultas yang nomenklatur fakultas syariah mengembangkan dua *core* keilmuan, yaitu: hukum ekonomi syariah/bisnis syariah, dan ilmu ekonomi syariah. Pembelajaran ekonomi Islam di fakultas ini, biasanya hadir di bawah naungan prodi/jurusan muamalah (ekonomi Islam) dan prodi/jurusan muamalah (hukum ekonomi Islam/bisnis Islam).

Di fakultas yang nomenklatur fakultas syariah dan hukum atau fakultas syariah dan ilmu hukum fokus mengembangkan pada aspek teori, doktrin, dan konsepsi Islam tentang ekonomi sehingga lahir nomenklatur prodi/konsentrasi muamalah (ekonomi Islam). Sedangkan di fakultas yang nomenklatur fakultas ekonomi atau fakultas ekonomi dan bisnis fokus mengembangkan aspek manajemen dari ekonomi Islam, dan pembelajaran ekonomi Islam hadir di bawah naungan prodi/jurusan manajemen.²²

Adapun pengembangan pembelajaran ekonomi Islam di STIE tampak lebih agresif dengan membuka banyak program studi dan konsentrasi dengan beban sekitar 157 sks (misalnya, STIE Yogyakarta, STEI SEBI, STIE Tazkia, dll.). Umumnya pembelajaran ekonomi Islam pada STIE-STIE ini tumbuh dengan kuat karena figur tokoh tertentu. Misalnya, di STIE Yogyakarta dengan figur Prof. Dr. H. Muhammad, M.Ag, di STIE SEBI dengan figur Prof. Dr. H. Didin Hafidudin, MA., di STIE Tazkia dengan figur Dr. H. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. Tokoh-tokoh sentral ini sangat berperan dalam menarik pasar sehingga dapat menyaingi PTAIN dan PTUN. Sedangkan, mata kuliah yang ditawarkan di STIE terdiri dari empat rumpun, yaitu: (1) rumpun mata kuliah syariah, (2) rumpun mata kuliah ekonomi dan umum, (3) rumpun mata kuliah manajemen, dan (4) rumpun mata kuliah akuntansi.²³

Rekonstruksi Pembelajaran Ekonomi Islam pada PTAI

Pembelajaran ekonomi Islam/Syariah dengan berbagai macam konsentrasi di PTAI tersebut di atas telah berlangsung lebih kurang satu dasawarsa Akan tetapi, pembelajarannya masih dapat digolongkan sebagai studi baru di dunia lembaga pendidikan tinggi agama Islam khususnya di PTAIN dalam bentuk UIN/IAIN/STAIN. Hal ini dapat dilihat pada beberapa model yang dikembangkan oleh PTAIN (UIN/IAIN/STAIN) yang telah membuka pembelajaran ekonomi Islam tersebut. Menurut Muhibbin Noor bahwa model-model yang ada dengan berbagai variasinya tersebut secara garis besarnya dapat digolongkan ke dalam dua model, yaitu:²⁴

²² Tim Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, UIN Bandung, UIN Malang, IAIN Semarang, IAIN Palembang, IAIN Surabaya, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011. Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, UIN Alauddin, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011, Tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Pekanbaru, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011. Tim Fakultas Ekonomi UIN Malang, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011. Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.

²³ Tim STIE Yogyakarta, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011, Tim STIE SEBI, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011, Tim STIE Tazkia, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.

²⁴ Muhibbin Noor, "Pengembangan Prodi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo", *Artikel Ekonomi Islam*, Dikutip dari www.iainwalisongo.ac.id, Diakses pada tanggal 20 Desember 2010.

Pertama, lebih menonjolkan pengajaran tentang fiqh muamalah dan keilmuan syariah lainnya, dan hanya memberikan pengajaran tentang teori-teori ekonomi secara global dengan pendekatan konseptual saja. Sementara itu ilmu ekonomi dan perbankan konvensional yang merupakan basis ilmu ekonomi itu sendiri kurang mendapatkan porsi yang mencukupi. Demikian juga dengan ilmu dan teknologi sebagai pendukung utama ilmu ekonomi, seperti matematika dan statistika atau ekonometrik misalnya kurang mendapatkan tempat. Tentu hal yang demikian akan mengakibatkan terjadinya pemahaman yang kurang tepat tentang ekonomi Islam secara utuh dan tidak dapat diandalkan serta tidak dapat dianggap sebagai disiplin ilmu yang terukur menurut kriteria pembelajaran yang sinergis antara *contents, conducts, contexts, dan contours*.²⁵

Kedua, lebih menonjolkan pengajaran tentang ekonomi konvensional dengan semua tingkatan pendekatannya, tetapi hanya sedikit memberikan pembelajaran tentang teori ekonomi Islam. Pembelajaran tentang ushul fiqh, fiqh muamalah, dan falsafah hukum Islam, misalnya kurang atau bahkan tidak mendapatkan porsi di dalamnya. Barangkali dalam kondisi tertentu keadaan ini dirasa mencukupi, ketimbang model pertama, karena basis keilmuan ekonomi yang dikuasai dianggap mencukupi, sedangkan tentang teori ekonomi Islam dianggap hanya merupakan tambahan yang tidak terlalu mendasar. Namun pada saat tertentu kondisi ini akan merupakan kelemahan yang menonjol apabila dihadapkan kepada masalah-masalah perbedaan konsep tentang hakekat ekonomi konvensional dan Islam. Demikian juga dalam dataran pengembangan, kondisi ini tidak akan dapat menolong alumninya untuk mengadakan langkah-langkah kreatif dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dua model tersebut di atas menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi Islam di PTAIN sedang dalam proses pencarian bentuk. Namun demikian, menegaskan satu model dan mengafirmasi model lain adalah suatu sikap yang tidak bijak. Akan tetapi, lebih baik memberi

ruang yang sama kepada kedua model tersebut untuk mengembangkan studi ekonomi Islam yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Oleh karena itu, baik PTAIN maupun PTAIS perlu merekonstruksi model pembelajarannya, yakni dengan berusaha memberikan penekanan kepada kedua model tersebut di atas. Penekanan terhadap teori-teori ekonomi secara umum harus mendapatkan prioritas, karena hal itu menjadi dasar dan fondasi bagi setiap ekonom, termasuk ekonom Islam sehingga akan dapat menolong alumninya untuk mengadakan langkah-langkah kreatif dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini semakin kompleks, karena itu program-program studi yang ditawarkan oleh PTAI juga dapat dan sangat mungkin bervariasi. Namun demikian untuk program studi ekonomi Islam, dapat mengadopsi pola yang telah dikembangkan di PTU. Pola tersebut meliputi: Program Studi Manajemen Keuangan, Program Studi Akuntansi, dan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,²⁶ kemudian dapat direkonstruksi menjadi: Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, dan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Syariah pada PTAI. Program-program studi ini dapat mengembangkan dirinya melalui konsentrasi-konsentrasi yang dibutuhkan, tentunya dengan mengingat berbagai hal, termasuk minat masyarakat pengguna, ketersediaan SDM, dan lainnya.

Kendala-kendala Rekonstruksi Pembelajaran Ekonomi Islam pada PTAI

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Euis Amalia dkk. bahwa permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, (termasuk di dalamnya PTAI) dalam mengembangkan pembelajaran ekonomi Islam terkait dengan kompetensi lulusan yang dihasilkan, yaitu terletak pada: (1) tenaga pengajar, (2) kurikulum dan kompetensi inti, (3) kondisi kekinian pada pembelajaran ekonomi Islam, (4) sarana

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), h. 89.

²⁶ Umar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 95.

praktikum, sistem informasi dan referensi ekonomi Islam yang masih minim, dan (5) kebijakan pimpinan dan kultur akademik.²⁷

Dari hasil penelitian Amalia dkk. di atas, dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh PTAI dalam merekonstruksi pembelajaran ekonomi Islam, agar dapat menghasilkan kompetensi lulusan yang dibutuhkan pasar, adalah sebagai berikut: *Pertama*, tenaga pengajar. Tenaga pengajar merupakan salah satu kunci penting pada perguruan tinggi. Tenaga pengajar ekonomi Islam pada PTAI bersumber dari alumni jurusan/prodi ekonomi Islam PTAI yang memiliki keunggulan pada penguasaan aspek ilmu-ilmu kesyariahan, tetapi memiliki kelemahan pada penguasaan aspek ekonomi, dan dari alumni fakultas ekonomi PTU yang memiliki keunggulan pada penguasaan aspek ekonomi, tetapi memiliki kelemahan pada penguasaan aspek ilmu-ilmu kesyariahan.²⁸ Karena itu, hal yang paling penting dilakukan meskipun sulit diwujudkan, adalah menyediakan tenaga pengajar integratif yang mampu memadukan antara aspek ilmu-ilmu syariah dengan aspek ilmu ekonomi.

Kedua, kurikulum dan kompetensi inti. Hingga saat ini belum ada kebijakan di tingkat nasional dalam hal standarisasi kurikulum inti ekonomi Islam. Kurikulum inti yang dimaksudkan di sini adalah sejumlah mata kuliah yang wajib diberikan untuk menghasilkan kompetensi utama menjadi sarjana ekonomi Islam/Syariah, yang disepakati oleh elemen perguruan tinggi dan asosiasi profesi yang kompeten di bidang ekonomi Islam. Sesungguhnya, industri keuangan syariah membutuhkan lulusan yang siap pakai dan langsung bekerja tanpa harus dilakukan pendidikan dan pelatihan serta adaptasi yang terlalu lama sehingga dibutuhkan biaya untuk *up grading* karyawan baru yang cukup tinggi. Akan tetapi industri keuangan syariah menilai

bahwa masih terjadi *mis-match* antara kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar.²⁹

Ketiga, kondisi kekinian pada pembelajaran ekonomi Islam. Hal ini merupakan masalah struktur akademik posisi kajian ekonomi Islam. Masalah ini dapat dilihat pada sebagian besar PTAI yang telah membuka program studi ekonomi Islam dengan nama dan pemahaman yang berbeda-beda. Misalnya, prodi muamalah, prodi ekonomi Islam/syariah, prodi keuangan syariah, prodi manajemen ekonomi perbankan syariah, dll. Perbedaan struktur akademik ini menjadi salah satu kendala dalam memenuhi kebutuhan sumber daya ekonomi Islam sesuai dengan kompetensi yang diharapkan yaitu SDM integratif.³⁰

Keempat, sarana praktikum, sistem informasi dan akses referensi ekonomi Islam yang masih minim. Sarana dan prasarana yang memadai berkorelasi positif dengan efektivitas kegiatan belajar mengajar ekonomi Islam pada perguruan tinggi. Karena itu, jika sarana praktikum, sistem informasi dan akses referensi ekonomi Islam yang dimiliki oleh PTAI tidak memadai maka akan menjadi salah satu kendala dalam proses pembelajaran ekonomi Islam di PTAI tersebut. Akibatnya, tidak dapat melahirkan output yang dapat berkompetisi dan memenuhi keinginan pasar.³¹ Oleh karena itu, sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran ekonomi Islam di PTAI harus memadai.

Kelima, kebijakan pimpinan dan kultur akademik. Pembelajaran ekonomi Islam pada perguruan tinggi sangat didukung oleh pimpinan dan kultur akademiknya. Dengan demikian jika pimpinan PTAI memahami bahwa pembelajaran ekonomi Islam yang baik adalah yang dapat menghasilkan output kompeten dan diinginkan oleh pasar, maka ia akan mendukung dilakukan rekonstruksi pembelajaran ekonomi Islam sesuai yang dikehendaki pasar, dan tentunya hal ini harus didukung pula kultur akademik di PTAI tersebut.³²

²⁷ Euis Amalia dkk., "Peta Potensi SDM Ekonomi Islam pada PTAI dan PTU: Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran dan Hubungannya dengan Kebutuhan SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Hasil Riset Perbankan Syariah-BI*, Tahap II, Tahun 2010, h. 172-175.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 173-174.

³¹ *Ibid.*, hlm. 174.

³² *Ibid.*, hlm. 175.

Agenda Pengembangan ke Depan

Berdasarkan penjelasan pada sub pembahasan di atas, maka kebijakan-kebijakan yang dapat diambil dalam mengembangkan pembelajaran ekonomi Islam pada PTAI ke depan, adalah sebagai berikut: 1) Mendorong PTAI untuk segera membuka jurusan/program studi ekonomi Islam/syariah secara tersediri, di mana ilmu ekonomi Islam dikembangkan dengan memadukan pendekatan normatif keagamaan dan pendekatan kuantitatif empiris yang disertai dengan komprehensivitas analisis. 2) Memperbanyak riset, studi, dan penelitian tentang ekonomi Islam baik yang berskala mikro maupun makro. Hal ini dapat memperkaya khazanah keimuan dan literatur ekonomi Islam, sekaligus sebagai alat ukur terhadap keberhasilan penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. 3) Mendorong penulisan kajian dan karya ilmiah ekonomi Islam melalui penerbitan buku dan jurnal ilmiah, seminar, lokakarya, diskusi dan talk show. 4) Memfasilitasi tenaga pengajar ekonomi Islam ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin meningkatnya mutu dan kualitas tenaga pengajar ekonomi Islam di PTAI yang integratif, yakni mampu memadukan ilmu di bidang ekonomi dengan aspek fikih, maka akan terwujud pembelajaran ekonomi Islam yang integratif di PTAI tersebut. 4) Mengutus secara rutin tenaga pengajar ekonomi Islam ke berbagai pelatihan, seminar, workshop maupun pendidikan terkait ekonomi Islam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan ekonomi Islam tenaga pengajar tersebut dari waktu ke waktu. 5) Standarisasi kurikulum ekonomi Islam secara nasional harus dilakukan. Standarisasi yang dimaksudkan di sini bukan berarti kurikulum ekonomi Islam seluruh PTAI harus sama, melainkan harus ada kesepakatan mengenai kompetensi dasar secara nasional. Hal ini akan berimplikasi pada standarisasi kurikulum ekonomi Islam yang harus diajarkan secara nasional di PTAI. 6) Sarana dan prasarana yang memadai harus diperkuat dalam menunjang proses pembelajaran ekonomi Islam di PTAI. Agar proses belajar mengajar tentang ekonomi Islam dapat berlangsung dengan baik di PTAI tersebut. 7) Magang atau *on the job training* bagi mahasiswa ekonomi Islam harus dilakukan untuk memenuhi salah satu harapan industri keuangan syariah terhadap lulusan ekonomi Islam yang

dihasilkan oleh PTAI. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa tersebut menghadapi dunia kerja selepas dari PTAI. Selain itu agar mahasiswa tersebut mampu memahami praktik operasional dari materi perkuliahan yang telah didapatkan di PTAI. 8) Sosialisasi dan edukasi ekonomi Islam harus dilakukan sedini mungkin, mulai dari siswa-siswa SD, SMP dan SMU sampai kepada masyarakat luas dengan metode dan cara yang cepat. 9) Mengembangkan *networking* yang lebih luas dengan berbagai institusi pembelajaran ekonomi Islam lainnya, lembaga-lembaga keuangan dan non keuangan Islam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Penutup

Pembelajaran ekonomi Islam/syariah dengan berbagai macam konsentrasi di PTAI telah berlangsung lebih kurang satu dasawarsa. Namun masih sedang dalam proses pencarian model pembelajaran. Untuk memenuhi keinginan pasar, PTAI maupun PTAIS perlu merekonstruksi model pembelajarannya, yakni dengan berusaha memberikan penekanan dan memadukan secara integratif terhadap aspek ilmu-ilmu syariah dan aspek ilmu ekonomi. Hal ini akan menjadi dasar dan fondasi bagi setiap alumninya untuk melakukan langkah-langkah kreatif dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kebutuhan dan tuntutan masyarakat saat ini semakin kompleks, karena itu program-program studi yang ditawarkan oleh PTAI juga dapat dan sangat mungkin bervariasi. Namun demikian untuk program studi ekonomi Islam, dapat mengadopsi pola yang telah dikembangkan di PTU. Pola tersebut meliputi: Program Studi Manajemen Keuangan, Program Studi Akuntansi, dan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, kemudian dapat direkonstruksi menjadi: Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Program Studi Akuntansi Syariah, dan Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Syariah pada PTAI. Program-program studi ini dapat mengembangkan dirinya melalui konsentrasi-konsentrasi yang dibutuhkan, tentunya dengan mengingat berbagai hal, termasuk minat masyarakat pengguna, ketersediaan SDM, dan lainnya.

Daftar Rujukan

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid Pertama, Terj. Soeroyo dan Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.
- Amalia, Euis, dkk., "Peta Potensi SDM Ekonomi Islam pada PTAI dan PTU: Analisis Kurikulum, Model Pembelajaran dan Hubungannya dengan Kebutuhan SDM pada Industri Keuangan Syariah di Indonesia", *Hasil Riset Perbankan Syariah-BI*, Tahap II, Tahun 2010.
- Chapra, Umar, *Islam and the Economics Challenge*, Nigeria: The Islamic Foundation and The International Insitute of Islamic Thought, 1992.
- _____, *The Future of Economics: an Islamic Perspective* (Leicester: Islamic Foundation, 2000.
- _____, *What is Islamic Economics?*, Jeddah: IRTI/IDB, No. 9 in the IDB Prize Winners' lecture Series, 1996.
- Firdaus, Muhammad, dkk., *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Cet. II, Jakarta: Renaisan, 2007.
- Hamalik, Umar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Ed. III, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi III, Cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Misanam, Munrokhim, dkk., *Ekonomi Islam*, Edisi I, Cet. 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nazir, Habib, dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Noor, Muhibbin, "Pengembangan Prodi Ekonomi Islam di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo", *Artikel Ekonomi Islam*, Dikutip dari www.iainwalisongo.ac.id, Diakses pada tanggal 20 Desember 2010.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.
- _____, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Yogyakarta: YPP AMP YKPN, 2005.
- Rachmat, Edy, "Meninjau Kembali Pengajaran Ekonomi Islam di PTAI", *Artikel*, Dikutip dari www.waspadamedan.com, Diakses pada tanggal 23 Desember 2010.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XX, Bandung: Mizan, 1999.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Tim Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011
- Tim Fakultas Ekonomi UIN Malang, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.
- Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, UIN Alauddin, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.
- Tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Pekanbaru, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.
- Tim Fakultas Syariah UIN Yogyakarta, UIN Bandung, UIN Malang, IAIN Semarang, IAIN Palembang, IAIN Surabaya, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.
- Tim STIE SEBI, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.
- Tim STIE Tazkia, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.
- Tim STIE Yogyakarta, "Buku Panduan Akademik Program Sarjana S.1", Tahun Akademik 2010/2011.